

**PENGARUH UPAH MINIMUM, PERTUMBUHAN
EKONOMI, ANGKATAN KERJA, DAN UNIT USAHA
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA
INDUSTRI PENGOLAHAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE 2015-2019**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Fauzan Seto Adi N.
145020100111039**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja dan Unit Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2019

Fauzan Setyo Adi Nugroho
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: fauzansetyoadinugroho@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Jawa Timur (studi dilakukan 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2015-2019). Metode yang digunakan adalah analisis data panel dengan Random Effect Model (REM) yang diolah menggunakan Eviews 9 sebagai alat analisis. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel upah minimum, angkatan kerja, dan unit usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan. Namun secara simultan, seluruh variabel tetap memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan nilai R² sebesar 0,5058 yang menunjukkan bahwa upah minimum, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan unit usaha memiliki pengaruh sebesar 50,58% terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur, sedangkan 49,42% sisanya diejelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini

Kata kunci: Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, Unit Usaha, Penyerapan Tenaga Kerja

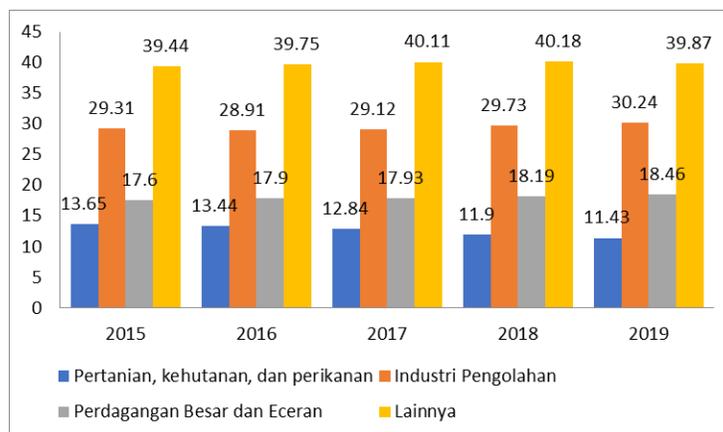
A. PENDAHULUAN

Pengangguran ialah satu dari sekian banyak permasalahan pada suatu perekonomian. Hubungan antara angka natalitas yang terus bertambah dan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang akan menyebabkan fenomena yang biasa disebut dengan pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi akan menciptakan pemakaian sumber daya yang tidak efisien, sehingga menyebabkan permasalahan lain seperti kemiskinan. Maka dari itu, diperlukannya perluasan penyediaan lapangan pekerjaan guna mengimbangi tingkat pertumbuhan angkatan kerja.

Di Indonesia, Jawa Timur juga menempati peringkat kedua dalam jumlah penduduk dengan jumlah 40 juta jiwa pada tahun 2020. Tetapi, Jawa timur juga merupakan provinsi yang sangat berpotensi bagi perekonomian Indonesia. Selain jumlah penduduk, Jawa Timur dengan nilai share 14,63% juga berada pada peringkat dua dalam menjadi kontributor bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setelah DKI Jakarta. Dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 38, Jawa Timur tentu memiliki berbagai potensi ekonomi mulai dari pertanian, Industri Pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. Tentunya berbagai potensi ekonomi Jawa Timur juga dihadapkan dengan fenomena tingginya angka populasi. Ketika jumlah lapangan pekerjaan dan angkatan kerja tidak seimbang, hal ini akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu pengangguran.

Ditinjau dari sumber dayanya, Jawa Timur mempunyai potensi yang tinggi bagi penanaman modal. Banyaknya ketersediaan sumber daya alam (sda) yang dapat di pergunakan sebagai bahan baku, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan akan baik bagi sektor industri dalam aspek ketersediaan bahan mentah. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku menurut sektor mengisyaratkan struktur perekonomian setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Dilihat dari konsep tersebut, Industri Pengolahan merupakan sebuah sektor yang mendominasi perekonomian Jawa Timur.

Gambar 1: Distribusi PDRB Jawa Timur 2015-2019



Mulai tahun 2015 hingga 2019, dari berbagai sektor ekonomi, Industri Pengolahan menunjukkan kontribusi tertinggi tiap tahunnya. Terdapat tiga sektor unggulan yang berkontribusi cukup besar dalam perekonomian Jawa Timur, yaitu Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Perdagangan. Grafik pada gambar 1.1, menunjukkan adanya kecenderungan menurun tiap tahun pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan PDRB yang paling tinggi terjadi di tahun 2015 dengan 13,65% dan terus turun tiap tahunnya hingga menyentuh angka 11,43% pada tahun 2019. Sedangkan sektor Perdagangan memiliki kecenderungan yang meningkat secara perlahan. Pada tahun 2015, kontribusi sektor ini dalam perekonomian Jawa Timur adalah 17,6% dan terus meningkat tiap tahunnya hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2019 dengan 18,46%. Industri pengolahan yang menjadi kontributor utama perekonomian Jawa Timur memiliki kecenderungan meningkat walaupun terjadi fluktuasi sebelumnya. Penurunan terjadi dari tahun 2015 dengan persentase 29,31% hingga 2016 dengan nilai 28,91%. Namun setelah itu mengalami peningkatan tiap tahun hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan nilai 30,24%.

Di sisi lain, besarnya potensi dari sektor Industri Pengolahan Jawa Timur yang dapat terlihat dari sumbangsinya terhadap PDRB, nyatanya belum mampu memberi kontribusi optimal dalam peyerapan tenaga kerja. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat bahwa kontribusi dan distribusi terhadap PDRB dari Industri Pengolahan belum bisa memberikan dampak secara langsung yang signifikan terhadap masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja. Fenomena ini dibuktikan dengan mayoritas penduduk Jawa Timur yang bekerja pada sektor pertanian yang nilai outputnya dibawah Industri Pengolahan.

Tabel 1: Penduduk Bekerja Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha (%)

Lapangan Kerja Utama	Tahun	
	2018 (%)	2019 (%)
Pertanian	32,49	32,08
Perdagangan	18,08	15,16
Industri Pengolahan	15,88	15,13
Konstruksi	7,06	11,90
Akomodasi Makan dan Minum	6,26	4,21
Lainnya	20,24	21,52

Dari tabel 1.2 diketahui bahwa masyarakat Jawa Timur mayoritas masih bekerja pada sektor pertanian. Pada tahun 2018, dari keseluruhan penduduk Jawa Timur yang bekerja, 32,49 persennya berada pada sektor pertanian. Hal ini tidak berbeda jauh pada tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 32,08 persen penduduk Jawa Timur bekerja pada sektor pertanian. Sementara itu, Industri Pengolahan hanya sanggup menyerap sebanyak 15,88 persen tenaga kerja dari keseluruhan penduduk yang bekerja pada tahun 2018. Kemudian di tahun berikutnya menurun menjadi 15,13 persen pada tahun 2019. Bahkan daya serap tenaga kerja Industri Pengolahan pun berada dibawah sektor perdagangan yang pada tahun 2018 dapat menyerap tenaga kerja sejumlah 18,08 dan pada tahun 2019 sebanyak 15,16. Sisanya, penduduk Jawa Timur tersebar pada berbagai sektor lainnya yang mencakup Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik, Gas, dan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang;

Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

Tentunya fenomena ini merupakan suatu permasalahan jika mengingat pada besarnya produktivitas maupun kontribusi yang dihasilkan sektor Industri Pengolahan Jawa Timur lebih besar dari sektor lainnya. Pada kenyataannya besarnya kontribusi Industri Pengolahan terhadap penerimaan daerah belum mampu menyerap pekerja dengan optimal.

Penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah kebijakan upah minimum. Upah di sini adalah bagian dari biaya produksi yang diberikan oleh pengusaha sebagai timbal balik dari aktivitas produksi yang dikerjakan oleh pekerja. Dalam hal ini, perubahan besaran upah akan memengaruhi total pekerja yang hendak dipekerjakan. Dalam menetapkan tingkat upah minimum, pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek ekonomi guna tercapainya keseimbangan antara demand dan supply pada pasar tenaga kerja (Mankiw, 2003).

Selain itu, angkatan kerja juga menjadi determinan penyerapan tenaga kerja. Kategorinya mencakup total penduduk usia 15-64 tahun, baik yang sedang bekerja ataupun sedang mencari kerja. Pada tabel 1.1 telah diterangkan bahwa dalam periode 2015-2019, angkatan kerja provinsi Mengalami peningkatan pada tiap tahunnya dari tahun 2016 hingga 2019. Sementara pada tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan. Angkatan kerja merupakan cerminan yang menggambarkan ketersediaan sumberdaya manusia pada suatu daerah, sehingga ketersediaan tenaga kerja yang banyak dapat memenuhi kebutuhan setiap sektor terkait SDM.

Faktor lain yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja selanjutnya adalah PDRB. PDRB merupakan nilai tambah atas barang atau jasa yang dihasilkan dari pelbagai sektor disuatu daerah pada jangka waktu tertentu (BPS, 2019). Laju dari PDRB yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menciptakan kesempatan kerja baru, dengan asumsi dengan meningkatnya PDRB akan meningkatkan jumlah nilai tambah output. Semakin besar nilai output, akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi sehingga membutuhkan tambahan tenaga kerja (Indradewa & Natha, 2013).

Selain ketiga faktor diatas, Unit Usaha juga mampu memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hal ini karena unit usaha merupakan gambaran dari lapangan pekerjaan yang akan menampung para pencari kerja. Tentunya dengan bertambahnya unit usaha, maka akan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga kemampuan suatu perusahaan dalam mempekerjakan pekerja pun bertambah.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pengolahan merupakan potensi ekonomi yang besar bagi perekonomian Jawa Timur. Besarnya potensi dari sektor ini, diharapkan dapat melakukan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Namun, hal ini dihadapkan dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat yang mengakibatkan walaupun angka TPT menurun tiap tahunnya tetapi terjadi penambahan jumlah pengangguran. Ditambah lagi dengan masih fluktuatifnya kondisi perekonomian Jawa timur. Maka penulis tertarik mengambil judul: “Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, dan Unit Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2019”.

B.

TINJAUAN PUSTAKA

Tenaga Kerja

Menurut Sumber Daya Manusia (SDM) ialah usaha yang dikerjakan oleh seorang manusia dalam proses produksi. Pada kasus ini, SDM adalah bobot kerja yang digunakan pada suatu periode guna menciptakan output produksi. Selain itu, bias juga diartikan sebagai orang yang mampu bekerja untuk memberikan jasa. Tentunya usaha dalam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi dalam rangka mengeluarkan output perusahaan untuk memenuhi permintaan dari pembeli. Secara umum, kemampuan seseorang dalam bekerja diukur dengan umur, sehingga pada usia kerja, orang dianggap masih sanggup bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut disebut sebagai tenaga kerja atau man power (working age population) (Sumarsono, 2009).

BPS menggolongkan penduduk atas dua bagian, yaitu masyarakat usia kerja dan masyarakat yang bukan. Kemudian, orang-orang pada usia kerja dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Selanjutnya, angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri atas orang yang masih sekolah, memilih mengurus rumah tangga, dan lainnya. Kemudian BPS mengklasifikasikan tenaga kerja menjadi:

1. Tenaga kerja penuh yang memiliki jumlah jam kerja > 35 jam seminggu;
2. Setengah penggguran dengan jam kerja < 35 jam seminggu

Menurut Pasal 1 UU No 13 tahun 2003, mendefinisikan tenaga kerja sebagai setiap individu yang sanggup

melakukan pekerjaan baik di luar maupun dalam ikatan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Industri pengolahan

Upah Menurut peraturan perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1984, di kemukakan tentang industri yang merupakan kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Selain itu, Industri Pengolahan merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang berkegiatan mengolah sebuah barang baku secara mekanis, kimia, atau dengan tangan hingga menjadikan barang tersebut barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang memiliki nilai yang rendah menjadi lebih tinggi nilainya, dan memiliki sifat lebih dekat pada pengguna akhir (BPS, 2021). BPS juga mengkategorikan industri menjadi 4 kelompok. Pengelompokan ini hanya berdasarkan pada banyaknya pekerja di dalam sebuah perusahaan, tanpa mempertimbangkan penggunaan mesin dan besarnya modal. Diantaranya adalah:

1. Industri besar, merupakan industri dengan pekerja 100 orang atau lebih;
2. Industri sedang, merupakan industri dengan pekerja 20 sampai 99 orang;
3. Industri kecil, merupakan industri dengan pekerja antara 5 sampai 19 orang; dan
4. Industri rumah tangga, merupakan industri dengan pekerja kurang dari 5 orang.

Upah Minimum

Faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja salah satunya adalah kebijakan upah minimum. Pengertian upah sendiri adalah timbal balik atas jasa dilakukan oleh pekerja di dalam perusahaan (Sukirno, 2000). Berdasarkan UU No 13 tahun 2003, upah diartikan sebagai hak bagi pekerja yang diterima serta diberikan dalam bentuk uang sebagai timbal balik dari perusahaan kepada tenaga kerja. Ketentuan besaran upah ditentukan dan diberikan sesuai dengan perjanjian kerja, maupun regulasi yang ada, termasuk tunjangan bagi pekerja atas kerjanya yang telah atau akan dilakukan.

Regulasi terkait upah minimum di Indonesia tertuang dalam Permenakertrans No 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Dalam peraturan tersebut, upah minimum di definisikan sebagai batas bawah dari upah yang diterima per bulan yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Kebijakan ini, ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman. Dalam UU No 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa, nilai upah pokok setidaknya harus 75 persen dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Sementara tunjangan tetap diartikan sebagai imbalan yang pembayarannya diberikan secara tetap dan tidak ada hubungannya dengan absensi dan prestasi kerja. Upah minimum dibagi dua menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku pada seluruh wilayah Jawa Timur dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di tiap kabupaten/kota.

Angkatan Kerja

Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk berusia 15 tahun keatas yang sedang bekerja atau sedang mencari kerja. Angkatan kerja diklasifikasikan menjadi dua, yakni:

1. Angkatan kerja yang bekerja
 - a) Golongan yang melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.
 - b) Golongan yang tidak bekerja kurang dari dua hari tetapi termasuk pekerja tetap seperti petani dan orang yang bekerja dalam keahlian
2. Angkatan kerja yang mencari pekerjaan
 - a) Golongan yang belum pernah bekerja ataupun sedang dalam pencarian pekerjaan
 - b) Golongan menganggur atau golongan yang sedang mencari kerja
 - c) Golongan yang dibebastugaskan dan sedang mencari pekerjaan

Selain masuk dalam kategori angkatan kerja, penduduk berusia 15 tahun keatas juga terdapat golongan yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja. Adapun kategori bukan angkatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Golongan orang yang masih menempuh pendidikan
2. Golongan orang kegiatannya hanya mengurus rumah tangga
3. Golongan orang yang tidak bekerja akan tetapi mendapat penerimaan seperti dari tunjangan pensiun, bunga bank, hasil sewa, dan lainnya
4. Lainnya, bagi orang yang hidupnya bergantung pada orang lain karena lanjut usia, memiliki keterbatasan, dan lainnya.

Unit Usaha

BPS mengartikan unit usaha sebagai perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang melakukan aktivitas ekonomi serta memiliki kewenangan yang ditetapkan berdasarkan fakta lokasi fisik bangunan, dan wilayah operasionalnya. Dalam teori neo klasik, unit usaha dikatakan melakukan aktivitas ekonomi seperti mendapatkan input, melaksanakan proses produksi, serta memasarkannya pada konsumen (Sadiah, 2020). Jika penerimaan marjinal (marginal revenue) sama dengan biaya marjinal (marginal cost), maka pada saat itulah perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Maka penerimaan marjinal ialah rasio antara tambahan penerimaan total dan tambahan unit yang terjual (Prasetyantoko, 2008).

Menurut Prabowo (dalam Lestari, 2011), Penyerapan tenaga kerja memiliki relasi yang positif dengan jumlah unit usaha. Hal ini dapat di artikan ketika terjadi penambahan unit usaha pada sebuah industri, maka dibutuhkan tambahan tenaga kerja pada tiap unit tambahan tersebut. Dampak dari hal tersebut adalah, penyerapan tenaga kerja akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah unit usaha.

Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznets memiliki pandangan tentang pertumbuhan ekonomi. Menurutnya pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan dalam jangka panjang dari sebuah negara untuk menyediakan pelbagai barang atau jasa kepada masyarakatnya. Hal ini, dipengaruhi oleh adanya teknologi yang semakin berkembang, unsur institusi, serta ideologis terhadap berbagai keadaan (Todaro & Smith, 2006).

Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan aktivitas ekonomi di suatu wilayah tertentu yang berdampak pada meningkatnya produksi barang atau jasa dan meningkatnya kemakmuran penduduknya (Sukirno, 2000). Dalam setiap periode, kapasitas suatu daerah untuk memproduksi barang atau jasa akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor produksi yang meningkat secara kuantitas maupun kualitas

C.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan ilmiah dengan melihat suatu realitas yang dapat diklarifikasi, konkrit, teramati, dan terukur. Hubungan antar variabel bersifat sebab akibat dimana data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. (Sugiyono, 2008)

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur. Wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 29 Kabupaten, 9 kota, 621 Kecamatan, 781 Kelurahan, dan 7.724 Desa.. Sedangkan waktu penelitian dalam penelitian ini adalah periode 2015-2019.

Definisi Operasional

Definisi dari setiap variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyerapan Tenaga Kerja (Y)
Penelitian ini menggunakan jumlah tenaga kerja sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2019.
2. Upah Minimum (X1)
Upah Minimum pada penelitian ini adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur dan berlaku untuk masing-masing kabupaten/kota di satu provinsi.
3. Pertumbuhan Ekonomi (X2)
Penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan yang berasal dari jumlah nilai tambah bruto dari semua sektor perekonomian suatu wilayah.
4. Angkatan Kerja (X3)

Angkatan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan penduduk usia kerja, baik yang sedang bekerja maupun pengangguran di Jawa Timur dalam periode tahun 2015-2019.

5. Unit Usaha (X4)

Unit usaha yang dibahas pada penelitian ini ialah jumlah unit usaha dalam sektor Industri Pengolahan di Jawa Timur pada tahun 2015-2019.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan data panel. Analisis statistik deskriptif dipergunakan untuk memberi gambaran dengan cara menganalisis dan menyajikan data kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini dilakukan dengan data panel. Dalam Nuryanto & Pambuko (2018), data panel disebutkan sebagai kombinasi data time series dan cross section. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara time series pada tahun 2015-2019 dan cross section pada seluruh kabupaten serta kota di provinsi Jawa Timur guna melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, upah minimum, dan unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa timur

Dalam penelitian ini menggunakan model ekonometrika sebagai berikut:

$$\ln Y = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + e_{it} \tag{1}$$

Keterangan:

Y : Penyerapan tenaga kerja

Ln : Logaritma Natural

β_0 : Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$: Koefisien regresi

X_1 : Upah Minimum

X_2 : Pertumbuhan ekonomi

X_3 : Angkatan kerja

X_4 : Unit usaha

e : komponen error

i : cross section

t : time series

D.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Panel

Berdasarkan hasil pemilihan model regresi data panel yaitu Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM didapatkan model terbaik yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Random Effect Model* (REM). Berikut merupakan hasil pengujian regresi data panel menggunakan *Random Effect Model* (REM):

Tabel 2 : Hasil Regresi

Variabel	Coefficient	Prob.
C	-13,95442	0,0000
UMP (X1)	1,178146	0,0000
Pertumbuhan Ekonomi (X2)	-0,777114	0,5858
Angkatan Kerja (X3)	0,486117	0,0012
Unit Usaha (X4)	0,001272	0,0007
F-Statistic (Prob.)		0,0048
R-Squared = 0,505833		

Sumber: Hasil regresi Eviews 9, diolah (2021)

Pembahasan

Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Nilai probabilitas untuk variabel upah minimum sebesar 0,0000 diketahui lebih kecil dari nilai signifikansinya (0,05). Sehingga upah minimum dapat disimpulkan memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur. Variabel upah minimum pada penelitian ini memiliki koefisien regresi bernilai positif sebesar 1,178146. Hal ini menjelaskan bahwa saat upah minimum meningkat satu persen, maka akan diiringi pula dengan peningkatan pada penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur sebesar 1,178146%.

Menurut teori permintaan tenaga kerja, ketika ada peningkatan terhadap upah makan pengusaha akan cenderung mengurangi pekerja demi meningkatkan efisiensi biaya produksi. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan teori tersebut, di mana peningkatan upah minimum dibarengi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh positif dari upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Jawa Timur terjadi karena jumlah investasi Jawa Timur yang tinggi. Menurut data *National Single Window for Investment*, Pada tahun 2019 Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama dalam jumlah nilai investasi pada sektor industri di Indonesia.

Di sisi lain, upah minimum merupakan sebuah variabel yang pergerakannya cukup stabil. Hal ini dikarenakan kebijakan atau penetapan upah minimum biasanya adalah kesepakatan dari tiga pihak yang terlibat (pengusaha, pekerja, dan pemerintah). Oleh karena itu, pengusaha cenderung tidak mengurangi pekerja akibat naiknya upah minimum. Selain itu, membaiknya kinerja pekerja dimungkinkan sebagai dampak kenaikan upah yang kemudian meningkatkan produktivitas perusahaan (Saputri, 2011).

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Regresi yang dilakukan menghasilkan 0,5858 sebagai nilai probabilitas untuk variabel pertumbuhan ekonomi. Karena lebih besar dari signifikansi (0,05), maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidaklah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur. Variabel pertumbuhan ekonomi di sini memiliki koefisien regresi dengan nilai negatif sebesar 0,777114. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur sebesar 0,777114%. Namun pertumbuhan ekonomi diketahui tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Jawa Timur dalam penelitian ini.

Harrod-Domar mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi yang mensyaratkan penggunaan barang-barang modal dengan tujuan perekonomian meraih pertumbuhan yang kuat (*steady growth*). Pembentukan modal dianggap sebagai sebuah pengeluaran yang berfungsi menstimulus perekonomian guna menghasilkan barang atau jasa. Penggunaan modal juga dianggap sebagai pengeluaran yang akan mendorong pertumbuhan tenaga kerja karena meningkatnya permintaan masyarakat. Peningkatan PDRB akan memengaruhi peningkatan PDB yang kemudian akan memberikan pengaruh positif kepada penyerapan tenaga kerja (Mankiw, 2003).

Kenyataannya hasil yang diperoleh pada penelitian ini tidak sesuai dengan teori tersebut, di mana pertumbuhan ekonomi tidak secara signifikan berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja Jawa Timur pada sektor industri pengolahan. Hal ini dapat terjadi karena Provinsi Jawa Timur memiliki 38 Kabupaten/Kota dengan kondisi perekonomiannya yang beragam. Jika melihat pada data yang telah diolah, adanya banyak wilayah di Jawa Timur yang pertumbuhan ekonominya baik tapi tidak selaras dengan penyerapan tenaga kerja industrinya.

Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Nilai probabilitas variabel angkatan kerja diketahui tidak lebih dari signifikansi 0,05, yaitu 0,0012. Hasil ini menandakan bahwa angkatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Koefisien regresi dari variabel angkatan kerja pada penelitian ini memiliki nilai positif sebesar 0,486117. Sehingga dapat disimpulkan ketika angkatan kerja meningkat satu persen, maka penyerapan tenaga kerja pun turut meningkat sebesar 0,486117%.

Lewis pada teorinya menjelaskan tentang perekonomian industri yang terletak pada perkotaan modern berperan penting dalam perekonomian secara keseluruhan. Karakteristik dari perekonomian ini terletak pada tingginya tingkat produktivitasnya serta menjadi tempat untuk menampung tenaga kerja yang ditransfer dari sektor pertanian. Dengan

begitu, ketersediaan angkatan kerja yang berlebih justru bagus untuk perkembangan ekonomi industri, karena adanya cadangan pekerja yang dapat terus di suplai.

Ditambah lagi, relasi positif antara angkatan kerja dengan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan Rakhmawati (2018). Pada penelitian tersebut, diterangkan bahwa adanya peningkatan terhadap angkatan kerja juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja karena kelebihan pekerja dalam suatu sektor akan menjadi cadangan pekerja bagi sektor lainnya. Disisi lain, angkatan kerja yang berlimpah diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi sebagai bonus demografi. Dengan sendirinya keberadaan angkatan kerja yang banyak akan membuat sektor lainnya tumbuh dan membuat roda perekonomian suatu daerah akan berputar, sehingga manfaatnya dirasakan kembali oleh masing-masing sektor.

Pengaruh Unit Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Probabilitas variabel unit usaha pada penelitian ini ialah 0,0007 tidak lebih dari signifikansi (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa unit usaha berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Unit Usaha mendapatkan koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 0,001272 pada penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa akan terjadi peningkatan pada penyerapan tenaga kerja sebesar 0,001272% ketika unit usaha meningkat sebesar 1%.

Menurut Prabowo (dalam Lestari, 2011), Penyerapan tenaga kerja memiliki relasi yang positif dengan jumlah unit usaha. Hal ini dapat di artikan ketika terjadi penambahan unit usaha pada sebuah industri, maka dibutuhkannya tambahan tenaga kerja pada tiap unit tambahan tersebut. Dampak dari hal tersebut adalah, penyerapan tenaga kerja akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah unit usaha. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Furqon tahun 2014. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat kaitan yang cukup kuat antara jumlah unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini karena unit usaha mencerminkan lapangan pekerjaan sebagai tempat yang menyerap tenaga kerja.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan dua penelitian di atas, di mana jumlah unit usaha secara positif dan signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur. Ditambah lagi, Jawa Timur merupakan salah satu destinasi utama investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena melimpahnya bahan baku dan jumlah populasi yang tinggi yang mencerminkan penawaran tenaga kerja. Hal tersebut yang mengakibatkan banyaknya industri baru yang bermunculan sehingga akan berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

E.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel upah minimum berpengaruh positif terhadap variabel penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi karena jumlah investasi Jawa Timur yang tinggi serta memiliki tren yang meningkat menjadi sebab meningkatnya penyerapan tenaga kerja ditengah kenaikan nominal upah minimum.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Jawa Timur. Hal itu karena Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota yang memiliki kondisi dan karakteristik ekonomi berbeda. Banyak daerah di Jawa Timur yang pertumbuhannya tidak mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industrinya. Fenomena tersebut disebabkan oleh struktur ekonomi dari tiap-tiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur pun berbeda, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap pada sektor lainnya seperti pertanian, perdagangan, pertambangan dan lainnya.
3. Variabel angkatan kerja juga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan di Jawa Timur. Hal ini karena tersedianya angkatan kerja yang banyak merupakan cadangan factor produksi bagi perusahaan, serta akan berdampak pula pada sektor lainnya, sehingga sektor lain pun ikut tumbuh yang mengakibatkan kondisi perekonomian suatu daerah akan membaik.
4. Sedangkan variabel unit usaha berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh, kondisi Jawa Timur yang merupakan salah satu destinasi utama investor di Indonesia untuk menanamkan modalnya, maka dari itu terbukanya industri-industri baru akan menambah lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian variabel upah minimum, diharapkan pemerintah dapat memperbaiki iklim investasi, sehingga menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini penting karena dengan adanya investasi yang tinggi, kenaikan upah tidak akan dibarengi oleh pengurangan tenaga kerja dari perusahaan, karena mereka membutuhkan tenaga kerja untuk mencapai tujuan investasinya.
2. Berdasarkan hasil penelitian variabel pertumbuhan ekonomi, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industry pengolahan karena kondisi perekonomian di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang beragam. Diharapkan pemerintah terus dapat memanfaatkan potensi ekonomi daerah sesuai dengan sektor andalannya. Sehingga, sektor andalan tiap daerah dapat secara optimal mengatasi permasalahan penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.
3. Berdasarkan hasil penelitian variabel angkatan kerja, diharapkan pemerintah terus berupaya untuk membuka lapangan kerja baru khususnya pada sektor industry agar dapat menampung angkatan kerja yang pertumbuhannya terus bertambah serta dapat menekan tingkat pengangguran terbuka.
4. Berdasarkan hasil penelitian variabel unit usaha, diharapkan pemerintah dapat mendorong terbukanya unit usaha industry baru dengan memelihara iklim investasi dan mengembangkan unit usaha yang sudah ada. Hal ini karena unit usaha merupakan tempat dimana ditampungnya para tenaga kerja khususnya pada sektor industry, sehingga ketersediaan unit usaha mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga jurnal ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Laporan Eksekutif Keadaan Tenaga Kerja di Jawa Timur Tahun 2015*. Jawa Timur: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Laporan Eksekutif Keadaan Tenaga Kerja di Jawa Timur Tahun 2016*. Jawa Timur: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Laporan Eksekutif Keadaan Tenaga Kerja di Jawa Timur Tahun 2017*. Jawa Timur: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Laporan Eksekutif Keadaan Tenaga Kerja di Jawa Timur Tahun 2018*. Jawa Timur: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Laporan Eksekutif Keadaan Tenaga Kerja di Jawa Timur Tahun 2019*. Jawa Timur: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran 2015-2019*. Jawa Timur: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Timur*. Jawa Timur: Badan Pusat Statistik.
- Bella, Shifa Annisa. 2018. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten?Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2016*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Edisi Kesatu, Cetakan Kelima*. Yogyakarta: BPF.
- Daengs, Achmad, 2020, *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi*, Surabaya, Unitomo Press.
- Dimas, dan Woyanti, N. 2009. Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Universitas Diponegoro* Vol.16 No. 1, Maret 2009: 32-41.
- Duamiry. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Emzir. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Raja Persada.
- Furqan, A. M. 2014. Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Jumlah Unit Usaha, dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur di Kabupaten Gresik tahun 1998-2012. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Malang*. Vol. 2 No. 2.
- Gujarati, D. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar dan Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2. Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. *Buku Pedoman Skripsi*. Malang: IE FEB UB.
- Indradewa, I. G. A., & Natha, K. S. 2015. Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Bali*. Vol. 4 No. 8, Agustus 2015: 873-1047.
- Mankiw, G. N. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mankiw, G. N. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Tata Caa Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
- Pramusinto, N. D., dan Daerobi, A. 2020. Labor Absorption Of The Manufacturing Sector In Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*. Vol 3 No. 1.
- Prasetyantoko. 2008. *Corporate Governance Pendekatan Institusional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, R. E. 2012. Pengaruh Investasi, Nilai Upah dan Nilai Produksi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Mebel di Kecamatan Pendurungan Kota Semarang. *Economics Development Analysis Journal Universitas*

Negeri Semarang.

- Rakhmawati, Atifatur. 2018. Analisis Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang*. Vol 2. No. 1. Februari 2018: 74-82.
- Sadiyah, Nuril Sarifah. 2020. Analisis Faktor Unit Usaha, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur pada Periode 2013-2018
- Saputri, O. D. 2011. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Salatiga*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Simanjuntak. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukirno, S. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, S. 2009. *Teori Sumber Daya Manusia dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Wihastuti, L., dan Rahmatullah, H. 2017. Upah Minimum dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Gama Societa, Universitas Gajah Mada*. Vol. 1 No. 1.
- Winarno, Wing Wahyu. 2017. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diakses dari:
http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diakses dari:
<http://simkeu.kemdikbud.go.id/index.php/peraturan/8-uu-undang-undang/12-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional>.

World Bank. 2010. *Laporan Ketenagakerjaan di Indonesia.* Jakarta. Diakses dari
<http://documents.worldbank.org/curated/en/180971468040514780/pdf/563480WP0Indon110Full0version0FINAL.pdf> pada 25 Juni 2019.